

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. H. (2017). *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach*. Singapore: Pearson.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020*.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2017). *Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (6 Mei 2022). Diambil kembali dari jabar.bpk.go.id: <https://jabar.bpk.go.id/>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2003). *Standar Audit 700 tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan*.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2013). *Standar Audit 260 tentang Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola*.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2013). *Standar Audit 705 tentang Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen*.

Murwanto, R., Budiarso, A., & Ramadhana, H. F. (2006). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Pendidikan Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.

Sugiwa, I. A. (26 Juni 2020). *Pertama Kali, Pemkab Bandung Barat Raih Opini WTP*. Diambil kembali dari Times Indonesia: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/279995/pertama-kali-pemkab-bandung-barat-raih-opini-wtp>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.